E-ISSN: 3025-0994
Halaman 3276-3282
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2028

Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Menangani Kasus Abnormal Studi Kasus: Lonjakan Arus Mudik Lebaran 2026 Pada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo)

Abidah Adelya[1], Loucha Noveratissahaladifa Putri[2], Ishma Nihayatul Mahmudah[3], Selliya Fuji Destari[4], Revany Chaila Syam[5], Rohmawati Kusumaningtias[6], Ambar Kusumaningsih[7]

[1,2,3,4,5,6,7] Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya
e-mail : 24080694265@mhs.unesa.ac.id[1], 24080694224@mhs.unesa.ac.id[2], 24080694207@mhs.unesa.ac.id[3], 24080694052@mhs.unesa.ac.id[4], 24080694318@mhs.unesa.ac.id[5], rohmawatikusumaningtias@unesa.ac.id[6], ambarkusumaningsih@unesa.ac.id[7]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam menghadapi kondisi abnormal berupa lonjakan arus mudik Lebaran 2026 pada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan data primer perusahaan, kemudian dianalisis secara deskriptif melalui teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran telah diterapkan, namun belum optimal dalam kondisi lonjakan operasional. Kendala utama terletak pada keterbatasan informasi real-time, lambatnya pengambilan keputusan, serta ketidakseimbangan layanan. Meskipun demikian, penerapan GCG terbukti berperan penting dalam menjaga stabilitas operasional, meningkatkan respons terhadap risiko, serta mempertahankan kepercayaan publik. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai penerapan GCG dalam kondisi abnormal serta menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dan regulator dalam meningkatkan kesiapan menghadapi krisis operasional.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Kondisi Abnormal, Arus Mudik, Pelindo, Manajemen Risiko

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in dealing with abnormal conditions, specifically the surge of Lebaran homecoming traffic in 2026 at PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). This research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews and secondary data from the company's operational reports, and analyzed descriptively using thematic analysis. The results indicate that the principles of GCG—transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness—have been implemented, but not yet optimally under conditions of operational surge. The main challenges include limited real-time information, delays in decision-making, and imbalances in service delivery. Nevertheless, the implementation of GCG plays an important role in maintaining operational stability, improving risk responsiveness, and sustaining public trust. This study contributes to the literature by providing insights into GCG practices in abnormal conditions and serves as an evaluation reference for companies and regulators in enhancing preparedness for operational crises.

Keywords: Good Corporate Governance, Abnormal Conditions, Homecoming Traffic, Pelindo, Risk Management

PENDAHULUAN

Arus mudik Lebaran selalu menjadi momen dengan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi di Indonesia. Pada momen ini, berbagai moda transportasi mengalami lonjakan pengguna, termasuk transportasi laut yang memiliki peran penting dalam mendukung perpindahan penumpang dan distribusi logistik antardaerah. Sebagai negara maritim, pelabuhan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran perjalanan masyarakat dan distribusi logistik antar daerah. Dengan meningkatnya jumlah penumpang dan aktivitas kapal saat mudik menyebabkan pelabuhan menghadapi tekanan operasional yang jauh lebih besar dibanding hari normal.

Lonjakan arus mudik Lebaran 2026 meningkatkan kepadatan di berbagai pelabuhan Indonesia. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti antrean panjang, keterlambatan pelayanan, penumpukan penumpang, hingga meningkatnya risiko gangguan operasional. Situasi seperti ini termasuk kasus abnormal karena aktivitas operasional perusahaan berada pada kondisi di luar kebiasaan normal dan membutuhkan penanganan yang lebih cepat serta terkoordinasi. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menurunkan efektivitas operasional perusahaan.

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelancaran aktivitas pelabuhan selama arus mudik berlangsung Pelindo tidak hanya dituntut mampu menyediakan fasilitas dan pelayanan yang memadai, tetapi juga harus memastikan seluruh aktivitas operasionalo mampu berjalan efektif ditengah tingginya lonjakan pengguna jasa. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan membutuhkan sistem pengelolaan yang mampu mendukung koordinasi, pengawasan, serta pengambilan keputusan secara tepat. Berdasarkan dari berita resmi PT Pelindo, terjadi peningkatan intensitas aktivitas penumpang dan pelayanan pelabuhan pada periode mudik yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Total pergerakan penumpang meningkat 14,14% dibanding pada tahun sebelumnya. Tingginya lonjakan pengguna jasa menyebabkan beberapa pelabuhan mengalami kepadatan operasional sehingga Pelindo dituntut mampu menjaga efektivitas pelayanan dan stabilitas operasional perusahaan.

Dalam mengatasi kondisi tersebut, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi penting untuk diterapkan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Good Corporate Governance* merupakan pedoman yang mengatur hubungan antara perusahaan dengan stakeholder melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness (Rahayu and Faatin. 2026). Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat membantu perusahaan menciptakan pengelolaan yang lebih terarah dan profesional. Dalam situasi lonjakan mudik, penerapan GCG menjadi penting untuk memastikan setiap pihak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan jelas sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.

Selain itu, penerapan *Good Corporate Governance* juga dapat membantu perusahaan dalam mengurangi risiko operasional yang muncul akibat tingginya aktivitas pelabuhan. Pengawasan yang baik, koordinasi antarbagian yang efektif, serta keterbukaan informasi menjadi hal penting dalam menangani kondisi abnormal. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan diharapkan mampu menjaga stabilitas operasional sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Studi terdahulu terkait penelitian mengenai *Good Corporate Governance* selama ini lebih banyak membahas pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan secara umum seperti penelitian Yusean & Anita (2023) yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG di PT Pelabuhan Indonesia Regional I Cabang Dumai sudah berjalan dengan baik dan didukung oleh peran audit internal dalam pengawasan serta evaluasi perusahaan. Selain itu, Ritonga (2023) menyatakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* secara teoritis dapat meningkatkan kecepatan dan efektivitas kinerja perusahaan melalui pengelolaan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Namun, penelitian yang secara khusus membahas penerapan Good Corporate Governance dalam menangani kasus abnormal pada sektor kepelabuhanan, terutama saat lonjakan arus mudik Lebaran, masih relatif terbatas.

Selain itu, penerapan Good Corporate Governance pada sektor kepelabuhanan juga berkaitan erat dengan kemampuan perusahaan dalam melakukan mitigasi risiko pada kondisi

darurat atau situasi yang tidak terduga. Lonjakan arus mudik Lebaran merupakan salah satu bentuk kondisi abnormal yang dapat memengaruhi stabilitas operasional pelabuhan apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Dalam situasi ini, perusahaan perlu memiliki sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat agar setiap aktivitas operasional dapat berjalan sesuai prosedur. Penerapan prinsip akuntabilitas dan responsibilitas dalam GCG membantu perusahaan memastikan setiap unit kerja menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sehingga potensi gangguan operasional dapat diminimalkan.

Penerapan prinsip transparansi juga menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran pelayanan selama periode mudik. Informasi terkait jadwal keberangkatan kapal, kapasitas penumpang, kondisi pelabuhan, hingga kebijakan operasional harus disampaikan secara jelas dan tepat kepada masyarakat. Keterbukaan informasi dapat membantu mengurangi kebingungan penumpang serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan perusahaan. Dalam kondisi kepadatan tinggi, komunikasi yang efektif antara perusahaan, pengguna jasa, dan pihak terkait menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga stabilitas operasional pelabuhan.

Di sisi lain, koordinasi antarinstansi juga menjadi bagian penting dalam penerapan Good Corporate Governance di lingkungan kepelabuhanan. Penanganan arus mudik tidak hanya melibatkan perusahaan pelabuhan, tetapi juga berbagai pihak seperti pemerintah daerah, operator kapal, aparat keamanan, serta instansi transportasi lainnya. Melalui penerapan tata kelola yang baik, proses koordinasi antarinstansi dapat berjalan lebih efektif sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat ditangani secara cepat dan terintegrasi. Hal ini penting untuk mengurangi risiko penumpukan penumpang maupun keterlambatan pelayanan selama periode mudik berlangsung.

Penerapan Good Corporate Governance juga berperan dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan perusahaan pada situasi abnormal. Dalam kondisi operasional yang padat, perusahaan dituntut mampu mengambil keputusan secara cepat namun tetap tepat dan terukur. Prinsip independensi dalam GCG membantu perusahaan menjaga objektivitas dalam menentukan kebijakan operasional tanpa adanya kepentingan tertentu yang dapat mengganggu efektivitas pelayanan. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat lebih fokus pada kepentingan pelayanan publik dan keberlangsungan operasional perusahaan.

Selain berdampak pada efektivitas operasional, penerapan Good Corporate Governance juga dapat meningkatkan citra dan reputasi perusahaan di mata masyarakat. Pelayanan yang berjalan dengan baik selama arus mudik akan memberikan kesan positif kepada pengguna jasa terhadap kemampuan perusahaan dalam mengelola pelabuhan pada kondisi padat. Kepercayaan masyarakat yang meningkat dapat menjadi salah satu bentuk keberhasilan perusahaan dalam menerapkan tata kelola yang profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, implementasi GCG tidak hanya penting bagi stabilitas internal perusahaan, tetapi juga bagi keberlanjutan hubungan perusahaan dengan masyarakat dan stakeholder lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan Good Corporate Governance memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengelolaan operasional pelabuhan selama arus mudik Lebaran 2026. Prinsip-prinsip GCG dapat membantu perusahaan menciptakan sistem kerja yang lebih terstruktur, transparan, dan efektif dalam menghadapi kondisi abnormal. Dengan penerapan tata kelola yang baik, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) diharapkan mampu menjaga kualitas pelayanan, meningkatkan efektivitas operasional, serta meminimalkan risiko gangguan selama periode mudik berlangsung.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* membantu PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dalam menangani kondisi abnormal berupa lonjakan arus mudik Lebaran 2026. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG dalam menjaga efektivitas operasional perusahaan selama periode mudik berlangsung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menyelidiki fenomena penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam menghadapi kondisi abnormal, khususnya pada periode lonjakan arus mudik Lebaran 2026 di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut (Dr.Sandu Siyoto, SKM., M.Kes & M.Ali Sodik, 2013)

pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian yang bertujuan memahami fenomena sosial dan permasalahan manusia berdasarkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan, serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan secara menyeluruh, rinci, dan mendalam.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang dinilai tepat dalam mengkaji fenomena secara kontekstual. Menurut (Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, 2017) studi kasus tidak hanya berfokus pada pertanyaan “apa” (*what*), tetapi juga “bagaimana” (*how*) dan “mengapa” (*why*). Pertanyaan “apa” digunakan untuk memperoleh gambaran deskriptif, “bagaimana” untuk menjelaskan proses atau mekanisme yang terjadi, serta “mengapa” untuk memahami alasan di balik suatu fenomena.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan operasional dan tata kelola perusahaan selama periode lonjakan arus mudik Lebaran 2026. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait proses pengambilan keputusan, pengendalian internal, serta respons manajemen dalam menghadapi kondisi abnormal.

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya terkait penerapan GCG dalam kondisi abnormal. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi studi kasus yang sistematis dan kontekstual, dengan mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema seperti pengambilan keputusan, pengendalian internal, respons organisasi, serta upaya menjaga kualitas pelayanan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dengan melihat pola dan hubungan dari data yang telah dianalisis. Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskripsi mendalam (*thick description*) untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana perusahaan mengelola kondisi lonjakan arus mudik, khususnya dalam menjaga kelancaran operasional dan kualitas pelayanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dalam menghadapi lonjakan arus mudik Lebaran 2026 telah dilakukan melalui berbagai mekanisme tata kelola, namun implementasinya menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi abnormal. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan analisis data primer, kondisi ini dikategorikan sebagai situasi abnormal karena melebihi kapasitas operasional normal serta meningkatkan risiko keterlambatan dan keselamatan (Sarjito, 2024). Dalam menghadapi kondisi tersebut, penerapan prinsip transparansi telah dilakukan melalui penyampaian informasi secara berkala kepada publik terkait jadwal keberangkatan dan kondisi pelabuhan melalui media resmi, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan keterlambatan informasi di lapangan.

Dari aspek akuntabilitas, struktur organisasi dan mekanisme koordinasi internal telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Narasumber penelitian mengungkapkan bahwa pembagian tugas antar unit operasional telah jelas dan terstruktur. Temuan ini sesuai dengan konsep GCG sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder (Syofyan and Putra, 2020). Meskipun demikian, dalam kondisi abnormal, proses pengambilan keputusan masih menghadapi keterlambatan, terutama dalam merespons lonjakan volume penumpang secara cepat, yang menunjukkan perlunya peningkatan fleksibilitas dalam sistem pengendalian internal. Selanjutnya, dari aspek responsibilitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menunjukkan tanggung jawabnya melalui penyediaan fasilitas tambahan, seperti ruang tunggu sementara, peningkatan layanan keamanan, serta fasilitas kesehatan. Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan tetap menjalankan tanggung jawab sosialnya kepada pengguna jasa, sebagaimana ditegaskan dalam teori stakeholder bahwa perusahaan memiliki kewajiban terhadap berbagai pihak yang berkepentingan (Pasaribu *et al.*, 2026).

Pada aspek independensi, hasil penelitian mengindikasikan bahwa secara umum pengambilan keputusan tetap mengacu pada kebijakan internal perusahaan. Namun, dalam praktiknya terdapat pengaruh eksternal dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam kelancaran arus mudik. Kondisi ini sejalan dengan perspektif agency theory yang menjelaskan

adanya potensi konflik kepentingan antara berbagai pihak dalam organisasi sehingga diperlukan mekanisme tata kelola yang kuat. Adapun dari aspek kewajaran, perusahaan telah berupaya memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh pengguna jasa. Namun, dalam kondisi lonjakan penumpang, masih ditemukan ketidakseimbangan layanan seperti antrean yang tidak merata dan keterbatasan fasilitas. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip fairness dalam GCG masih menghadapi tantangan, khususnya dalam situasi krisis operasional yang memerlukan respons cepat dan adaptif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Pelindo dalam menghadapi kondisi abnormal telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Efektivitas penerapan GCG sangat dipengaruhi oleh kesiapan sistem informasi, kecepatan pengambilan keputusan, serta kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap tekanan operasional yang tinggi.

Berdasarkan hasil analisis, penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dalam menghadapi lonjakan arus mudik Lebaran 2026 menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas organisasi pada situasi abnormal. Lonjakan jumlah penumpang, kepadatan kendaraan, dan meningkatnya tuntutan pelayanan merupakan kondisi yang berpotensi menimbulkan gangguan operasional apabila tidak dikelola secara tepat. Dalam kondisi seperti ini, GCG berfungsi sebagai pedoman agar perusahaan tetap mampu menjalankan kegiatan secara terarah, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan (Bernstein, 2020) yang menjelaskan bahwa perusahaan membutuhkan sistem crisis governance agar mampu merespons gangguan melalui kepemimpinan yang kuat dan pengawasan yang efektif.

Dari aspek transparansi, Pelindo dituntut mampu menyampaikan informasi secara cepat dan akurat kepada masyarakat terkait jadwal kapal, kondisi antrean, perubahan layanan, serta kapasitas pelabuhan selama masa mudik. Keterbukaan informasi sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian pengguna jasa dan menjaga kepercayaan publik. Menurut (Oliveira, Luiz and Quelhas, 2025) organisasi yang tetap menerapkan transparansi saat kondisi krisis akan lebih mampu mempertahankan kepercayaan stakeholder dan meminimalkan konflik pelayanan. Pada aspek akuntabilitas, perusahaan perlu memastikan bahwa setiap unit kerja memahami tugas dan tanggung jawabnya selama masa lonjakan penumpang. Pembagian wewenang yang jelas akan mempercepat pengambilan keputusan dan meminimalkan kesalahan koordinasi. Dalam situasi abnormal, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan, tetapi juga kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas setiap keputusan operasional.(Zattoni and Pugliese, 2021) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki struktur governance jelas akan lebih adaptif dalam menghadapi tekanan krisis.

Selanjutnya, prinsip responsibilitas tercermin melalui upaya Pelindo dalam menyediakan fasilitas tambahan seperti ruang tunggu sementara, layanan kesehatan, pengamanan, dan pengaturan arus kendaraan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa. Menurut (Polytechnic and Province, 2020), implementasi GCG mendorong perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder. Pada prinsip independensi, Pelindo harus mampu mengambil keputusan operasional berdasarkan kebutuhan lapangan dan standar keselamatan, bukan karena tekanan pihak tertentu. Dalam kondisi mudik, banyak kepentingan yang terlibat sehingga potensi intervensi dapat terjadi. Oleh sebab itu, independensi sangat diperlukan agar kebijakan perusahaan tetap objektif dan berorientasi pada kepentingan umum. Prinsip ini juga sesuai dengan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang menekankan pentingnya pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan.

Selain itu, prinsip kewajaran juga menjadi tantangan penting. Seluruh pengguna jasa harus memperoleh akses layanan yang sama, termasuk sistem antrean, fasilitas umum, dan pelayanan prioritas bagi kelompok rentan. Jika distribusi layanan tidak merata, maka kepercayaan publik dapat menurun. Oleh karena itu, keadilan pelayanan menjadi indikator penting keberhasilan GCG dalam kondisi abnormal. Secara keseluruhan, penerapan GCG pada PT Pelindo menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan tidak hanya dibutuhkan dalam kondisi normal, tetapi justru semakin penting ketika perusahaan menghadapi situasi abnormal. Dengan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran secara konsisten, perusahaan akan lebih siap menjaga kelancaran operasional

serta mempertahankan kepercayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) memiliki peran yang sangat penting dalam membantu PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menghadapi lonjakan arus mudik Lebaran 2026 sebagai kondisi abnormal. Penerapan prinsip transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi layanan secara jelas, sedangkan akuntabilitas membantu perusahaan menjalankan koordinasi internal secara terarah dan efektif. Selain itu, prinsip responsibilitas tercermin dari upaya perusahaan dalam menyediakan fasilitas tambahan demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa. Independensi diperlukan agar keputusan operasional tetap objektif, sementara kewajaran penting untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang adil. Dengan demikian, GCG menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas perusahaan di tengah tekanan operasional yang tinggi. Meskipun demikian, penerapan GCG masih perlu terus diperkuat melalui peningkatan sistem informasi real time, percepatan koordinasi antarunit, serta evaluasi risiko secara berkala. Jika hal tersebut dilakukan secara konsisten, maka Pelindo akan semakin siap menghadapi berbagai situasi abnormal di masa mendatang tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdel-Motaal, K.A. And Chun, S. (2025) ‘Governance In Crisis : A Mixed-Methods Analysis Of Global Health Governance During COVID-19’.

Alpaslan, C.M., Green, S.E. And Mitroff, I.I. (2009) ‘Corporate Governance In The Context Of Crises : Towards A Stakeholder Theory Of Crisis Management’, 17(1), Pp. 38–49.

Bernstein, A. (2020) ‘An Introduction To Joint Powers Authorities , Their Funding Mechanisms , And Why California Should Utilize One In Order To Create An Effective Forest Management System To Prevent Wildfires An Introduction To Joint Powers Authorities , Their Funding Mechanisms , And Why California Should Utilize One In Order To Create An Effective Forest Management System To Prevent Wildfires’, 16(2).

Dr.Sandu Siyoto, SKM., M.Kes & M.Ali Sodik, M.. (2013) ‘Dasar Metodologi Penelitian’.

Gennaro, A. (2021) ‘Corporate Governance And Risk Management : Lessons (Not) Learnt From The Financial Crisis Corporate Governance And Risk Management : Lessons (Not) Learnt From The Financial Crisis’, Pp. 0–19.

Oliveira, R.R. De, Luiz, O. And Quelhas, G. (2025) ‘Structuring Corporate Governance In The Context Of Crisis : Lessons From The COVID-19 Pandemic In A Nonprofit Organization’.

Pasaribu, A.S. Et Al. (2026) ‘TEORI-TEORI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PERSPEKTIF PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA’, 4(1), Pp. 580–587.

Polytechnic, J.E. And Province, S. (2020) ‘The Approaches And Strategies Of Professional Development Of Higher Vocational Teachers Under The Background Of Educational Informalization Sujuan Zheng’, 412(Icmetie), Pp. 38–43.

Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.S. (2017) ‘STUDI KASUS DALAM PENELITIAN KUALITATIF: KONSEP DAN PROSEDURNYA’.

Rahayu, S.I. And Faatin, S.F. (2026) ‘ANALISIS IMPLEMENTASI ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD PADA PERUSAHAAN INDONESIAN TOP 50 PLCS : STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF TERHADAP KOMPONEN TATA KELOLA PERIODE 2019 – 2023’, Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, 3, Pp. 787–807. Available At: Https://Journal.Hasbaedukasi.Co.Id/Index.Php/Jurmie .

Ritonga, P. (2023) ‘PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP’, Journal Of Comprehensive Science, 2(3), Pp. 820–824.

Sarjito, A. (2024) ‘Transformasi Keselamatan Transportasi Laut Indonesia Melalui Teknologi Dan Inovasi : Kajian Literatur’, 22(1), Pp. 1–15.

Syofyan, R. And Putra, D.G. (2020) ‘The Role Of Good Corporate Governance (GCG) Implementation In Indonesian Company’, 124, Pp. 819–825.

Trautman, B.L.J. Et Al. (2017) ‘The Board ’ S Responsibility For Crisis Governance’, (2011), Pp. 275–350.

Yusean, D.R. And Anita, N. (2023) ‘Peran Audit Internal Dalam Implementasi Prinsip-Prinsip

Good Corporate Governance Di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Cabang Dumai', Borobudur Accounting Review, 3(2), Pp. 67–80. Available At: Https://Doi.Org/10.31603/Bacr.9855.

Zattoni, A. And Pugliese, A. (2021) 'Corporate Governance Research In The Wake Of A Systemic Crisis : Lessons And Opportunities From The', (July). Available At: Https://Doi.Org/10.1111/Joms.12693.